

OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH: TINJAUAN EKONOMI

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This study discusses the optimisation of land asset utilisation by local governments as a strategic effort to increase local revenue (PAD) from an economic perspective. Using a literature review method, this study examines the concepts, theories, and practices of effective and efficient land asset management, including supporting factors and obstacles encountered in its implementation. The findings indicate that planned, transparent land asset management that leverages information technology can increase the economic value of land and local revenue in a sustainable manner. Additionally, the role of public-private partnerships and adaptive regulations are key to successfully optimising land assets. This study provides policy recommendations that can serve as a basis for local governments in developing innovative and accountable land asset management mechanisms to promote economic growth and community welfare.

Keywords: *Land asset optimisation, local revenue, asset management, economic analysis, local revenue, public-private partnerships, asset management policy.*

Abstrak

Penelitian ini membahas optimalisasi pemanfaatan aset tanah oleh pemerintah daerah sebagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari perspektif ekonomi. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji konsep, teori, serta praktik pengelolaan aset tanah yang efektif dan efisien, termasuk faktor-faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah yang terencana, transparan, dan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah dan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, peran kemitraan publik-swasta dan regulasi yang adaptif menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan aset tanah. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan mekanisme pengelolaan aset tanah yang inovatif dan akuntabel guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Optimalisasi aset tanah, pendapatan daerah, pengelolaan aset, kajian ekonomi, pendapatan asli daerah, kemitraan publik-swasta, kebijakan pengelolaan aset.

Pendahuluan

Aset tanah merupakan salah satu sumber daya penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan aset tanah yang efektif dan

efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisi keuangan daerah. Pengelolaan aset tanah yang optimal bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan teknis, tetapi juga mencakup aspek ekonomi yang mendasari nilai dan manfaat aset tersebut bagi daerah (Peterson, 2008).

Pentingnya aset tanah sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi daerah mendorong pemerintah untuk memperhatikan bagaimana aset tersebut dapat dioptimalkan. Optimalisasi pemanfaatan aset tanah tidak hanya bertujuan untuk menghindari pemborosan, tetapi juga untuk memaksimalkan efek ekonomi yang dihasilkan, termasuk memperbesar penerimaan asli daerah melalui berbagai mekanisme pengelolaan yang tepat. Pemanfaatan yang kurang optimal dapat menyebabkan potensi pendapatan daerah tidak tergali secara maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi (UN-Habitat, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi, aset tanah merupakan sumber daya yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui, sehingga pengelolannya harus dilakukan dengan strategi yang bijak agar nilainya terus meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi dalam mengelola aset tanah sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset tersebut dalam mendukung pendapatan daerah (AMRO, 2025).

Pendapatan daerah merupakan elemen penting dalam pembangunan, karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset tanah sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah harus diarahkan agar memberikan kontribusi optimal dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini menjadikan pengelolaan aset tanah tidak hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga strategi ekonomi yang fundamental (Afiff, 2019).

Berbagai kebijakan dan regulasi telah diimplementasikan untuk mengatur pengelolaan aset tanah oleh pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan aset tersebut. Mulai dari permasalahan administratif, legalitas, hingga hambatan teknis dan sosial yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset tanah secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 2020). Kendala-kendala tersebut mengharuskan adanya kajian mendalam yang dapat memberikan gambaran tentang strategi terbaik dalam pengelolaan aset tanah agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi daerah. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memahami lebih baik bagaimana optimalisasi pengelolaan aset tanah dapat

berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal dalam konteks pendapatan daerah (Sinurat, 2020).

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah tidak hanya berarti mengelola aset yang sudah ada, tetapi juga menggali potensi penggunaan tanah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini termasuk merencanakan pemanfaatan lahan secara strategis agar memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi daerah (Liu, 2022).

Dalam konteks ini, analisis ekonomi menjadi alat penting untuk mengukur kontribusi aset tanah terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan analisis yang tepat, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan dan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penerimaan asli daerah dari aset tanah yang dimiliki. Analisis ini juga dapat menjadi bahan evaluasi atas keberhasilan atau kegagalan kebijakan pengelolaan aset tanah yang sebelumnya diterapkan. Dari sisi kebijakan, pemerintah pusat dan daerah perlu bersama-sama mengembangkan regulasi dan mekanisme pengelolaan aset tanah yang transparan dan akuntabel. Kebijakan yang baik akan memberikan landasan yang kuat bagi optimalisasi pemanfaatan aset tanah, sekaligus mendorong partisipasi stakeholder, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam pemanfaatan aset tanah secara produktif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (literature review), yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber informasi terkait pemanfaatan aset tanah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sudut pandang ekonomi. Sumber data yang dikaji meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan studi kasus terdahulu yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep teori, kebijakan, serta praktik terbaik pengelolaan aset tanah di berbagai daerah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi pemanfaatan aset tanah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara komprehensif dan sistematis (Eliyah & Aslan, 2025); (Baumeister & Leary, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah di Daerah

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah di daerah merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pendapatan pemerintah daerah sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Aset tanah merupakan bagian besar dari kekayaan daerah, dan pengelolaan strategisnya dapat membuka potensi ekonomi yang cukup besar. Pengelolaan aset tanah yang efektif tidak hanya mencakup perlindungan dan

pemeliharaan tanah, tetapi juga memastikan penggunaannya selaras dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan ekonomi daerah (Rahman, 2021).

Elemen utama dalam optimalisasi pemanfaatan aset tanah adalah mengidentifikasi penggunaan lahan yang paling produktif dan memberikan manfaat ekonomi terbesar. Hal ini memerlukan perencanaan spasial yang komprehensif serta pemahaman terhadap konteks ekonomi lokal. Dengan menyelaraskan penggunaan lahan sesuai prioritas ekonomi, seperti industri, pertanian, perumahan, atau area komersial, pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan ekonomi sekaligus manfaat bagi Masyarakat (Agnes, 2023).

Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lahan modern, termasuk zonasi dan regulasi penggunaan lahan, memiliki peran penting dalam optimalisasi aset tanah. Mekanisme ini membantu mencegah penyalahgunaan lahan dan praktek spekulasi yang dapat menurunkan nilai tanah atau membatasi potensinya. Kebijakan yang jelas memastikan lahan dialokasikan untuk penggunaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial (Tarigan, 2024). Salah satu pendekatan signifikan adalah pemanfaatan nilai aset tanah melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Kerjasama publik-swasta dapat menggerakkan investasi untuk proyek infrastruktur dan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya tanah daerah secara efisien. Kolaborasi ini biasanya membawa keahlian teknis dan modal yang mungkin kurang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga mempercepat realisasi potensi ekonomi tanah (Mi'raj, 2024).

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah juga melibatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola tanah. Pembuatan catatan kepemilikan tanah yang jelas, pengurangan birokrasi yang berbelit, dan pencegahan korupsi sangat penting untuk menciptakan iklim kepercayaan bagi investor dan pengembang. Kepastian hukum dapat meningkatkan likuiditas tanah dan merangsang aktivitas transaksi yang berkontribusi pada pendapatan daerah (Yani, 2024). Kemajuan teknologi menawarkan peluang baru untuk optimalisasi pemanfaatan aset tanah. Sistem Informasi Geografis (SIG), penginderaan jauh, dan sistem informasi tanah membantu pemetaan yang tepat, pemantauan, dan penilaian lahan. Alat-alat ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data akurat tentang karakteristik tanah, batas wilayah, dan penggunaan saat ini, yang menjadi dasar perencanaan strategis (Mubaraqh, 2025).

Pemanfaatan aset tanah yang efektif harus mengatasi tantangan degradasi lahan dan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi berlebihan atau penggunaan lahan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga mengancam produktivitas tanah jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengelolaan aset untuk menjamin manfaat ekonomi yang berkelanjutan (Ibrahim & Ridwan, 2020).

Pengembangan kapasitas dalam lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tanah juga menjadi faktor penting. Pelatihan sumber daya manusia dalam praktik pengelolaan lahan modern, penilaian ekonomi, dan perumusan kebijakan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan strategi penggunaan tanah yang optimal serta memperbaharui data tanah secara berkala (Ghena et al., 2025).

Mekanisme keuangan seperti penyewaan tanah, penjualan tanah, dan izin penggunaan tanah merupakan instrumen untuk mengoptimalkan aset tanah. Penetapan harga tanah berdasarkan mekanisme pasar memungkinkan pemerintah daerah menangkap nilai tambah tanah yang dihasilkan dari investasi publik dan perubahan tata guna lahan. Pendapatan ini kemudian dapat diinvestasikan kembali dalam program pembangunan daerah (Istiharoh, 2023).

Praktik inovatif seperti penggabungan dan penyesuaian tanah dilakukan dengan mengkonsolidasikan lahan yang terpecah-pecah atau kurang dimanfaatkan secara kolektif. Metode ini dapat meningkatkan nilai tanah, memperbaiki penyediaan infrastruktur, dan memfasilitasi ekspansi perkotaan atau pengembangan industri secara teratur.

Kerangka hukum perlu disempurnakan secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang berkembang. Peraturan yang jelas mengenai hak atas tanah, pengadaan, dan penyelesaian sengketa mengurangi konflik dan mendorong penggunaan lahan yang produktif. Fleksibilitas regulasi juga memungkinkan penyesuaian dengan sektor ekonomi baru dan kebutuhan demografis yang berubah. Selain faktor ekonomi, aspek sosial harus diperhatikan dalam optimalisasi pemanfaatan aset tanah. Partisipasi masyarakat serta akses yang adil terhadap sumber daya tanah mendorong kohesi sosial dan mencegah konflik yang bisa muncul dari keputusan penggunaan tanah yang dirasakan tidak adil (WRI Indonesia, 2020).

Pemantauan dan evaluasi menjadi komponen penting untuk mengukur efektivitas strategi pemanfaatan aset tanah. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja yang melacak efisiensi penggunaan tanah, kontribusi pendapatan, dampak lingkungan, serta hasil sosial untuk membimbing penyesuaian kebijakan di masa mendatang (Nurdiana & et al., 2024).

Integrasi pemanfaatan aset tanah dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh menjadi penting agar terjadi koherensi dan sinergi. Koordinasi antar sektor pemerintahan seperti perumahan, transportasi, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya tanah secara holistic (Lindborg, 2023).

Studi kasus dari berbagai daerah menunjukkan keberhasilan optimalisasi sering kali bergantung pada model pemerintahan inovatif dan kolaborasi pemangku kepentingan. Daerah-daerah yang menerapkan perencanaan partisipatif dan kebijakan inklusif cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan aset tanah.

Tantangan seperti kepemilikan lahan informal, penggunaan tanah ilegal, dan spekulasi tanah masih menjadi hambatan besar. Penanganan masalah ini membutuhkan penegakan hukum yang kuat, edukasi masyarakat, serta insentif ekonomi yang mendorong praktik yang sehat dan formalisasi kepemilikan tanah (McCarthy & Robinson, 2017).

Akhirnya, Adaptasi pelajaran yang dipetik memungkinkan pemerintah daerah menyempurnakan pendekatan mereka, merespon tantangan baru, dan mengoptimalkan potensi ekonomi tanah secara penuh. Pendekatan komprehensif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tanah ini dapat memberikan peningkatan signifikan pada pendapatan pemerintah daerah serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya tanah yang efisien, adil, dan ramah lingkungan.

Dampak Optimalisasi Aset Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

Optimalisasi aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang efektif dan pemanfaatan yang optimal, aset tanah dapat menghasilkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar, yang menjadi modal penting dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Urban Agenda Platform UK, 2023).

Pemanfaatan aset tanah secara optimal memungkinkan pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari berbagai mekanisme, seperti penyewaan, jual-beli, kemitraan pembangunan, hingga skema bagi hasil dengan pihak swasta. Hal ini meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan daerah yang sebelumnya mungkin bergantung pada pajak dan retribusi semata. Dampak positif optimalisasi aset tanah terlihat dalam peningkatan penerimaan daerah yang bersifat berkelanjutan (PwC Indonesia, 2023). Ketika aset tanah dimanfaatkan secara produktif, misalnya untuk pengembangan kawasan komersial atau industri, maka kontribusi pendapatan daerah tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, optimalisasi juga menciptakan efek multiplier di ekonomi lokal. Pendapatan yang diperoleh dari aset tanah bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik yang meningkatkan daya tarik investasi, membuka lapangan kerja baru, dan menggerakkan aktivitas ekonomi lainnya di daerah (IMF, 2024).

Pengelolaan aset tanah yang baik juga memperkuat posisi keuangan daerah. Dengan pendapatan daerah yang meningkat, pemerintah lokal memiliki kapasitas lebih besar untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan otonomi fiskal daerah (Nustini & Nurrahman, 2023).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tanah menjadi kunci keberhasilan optimalisasi. Pemerintah daerah yang dapat mengelola data aset dengan baik, menyusun regulasi yang jelas, dan menjalankan pengawasan yang ketat akan

meminimalisir risiko penyalahgunaan dan penggelapan aset. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sistem manajemen aset digital juga berdampak penting. Data aset yang akurat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan strategi pemanfaatan tanah yang tepat sasaran dan efisien (Reith, 2022).

Optimalisasi aset tanah juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekonomi tanah itu sendiri. Melalui penataan penggunaan lahan yang terencana dan efektif, nilai tanah meningkat sehingga potensi pendapatan dari transaksi aset juga makin besar. Peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi aset tanah juga dapat mendukung pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan sumber dana yang membaik, pemerintah daerah dapat lebih baik mendanai program sosial dan pengembangan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk (Zhao, 2025).

Dampak lain yang signifikan adalah peningkatan kapasitas investasi daerah. Pendapatan yang diperoleh dari aset tanah memungkinkan daerah untuk berinvestasi lebih besar di sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, optimalisasi aset tanah tidak tanpa tantangan. Hambatan administratif, perizinan yang rumit, dan konflik sosial yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah kadang menghambat pemanfaatan aset secara maksimal (Linuhung, 2023).

Masalah legalitas aset seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah dapat mengurangi nilai ekonomi aset dan membatasi potensi pendapatan yang dapat diperoleh oleh daerah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah legalisasi aset menjadi prioritas untuk mendukung optimalisasi.

Penerapan kebijakan yang mendukung pemanfaatan aset tanah secara kreatif dan inovatif, misalnya melalui kerjasama dengan sektor swasta dan inisiatif pengembangan kawasan, mampu memaksimalkan nilai ekonomi aset dengan skala yang lebih luas. Optimalisasi aset tanah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial juga memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan aset yang berwawasan lingkungan menjaga produktivitas tanah sekaligus menghindari konflik sosial (ASEAN Secretariat, 2025).

Dampak ekonomi dari optimalisasi aset tanah juga terlihat dari peningkatan pendapatan pajak daerah yang berkaitan dengan aktivitas di atas tanah, seperti pajak reklame, pajak bangunan, dan pajak usaha yang berkembang seiring dengan pemanfaatan aset tanah. Ketika pengelolaan aset berjalan baik, pendapatan daerah yang bertambah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah. Hal ini membuka peluang investasi lebih besar dan aktivitas ekonomi semakin dinamis (Myers, 2016).

Terakhir, dampak positif optimalisasi aset tanah terhadap pendapatan daerah juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih baik, pemerintah daerah

dapat meningkatkan fasilitas dan layanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga (Sinurat, 2020).

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan aset tanah merupakan strategi penting yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dan sosial daerah secara luas, apabila dijalankan dengan pendekatan yang komprehensif, transparan, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Optimalisasi pemanfaatan aset tanah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Melalui pengelolaan yang strategis dan terencana, aset tanah dapat dimanfaatkan secara produktif dengan berbagai mekanisme seperti penyewaan, penjualan, kemitraan publik-swasta, serta perencanaan tata guna lahan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga manfaat ekonomi berkelanjutan yang mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

Dari sudut pandang ekonomi, pengelolaan aset tanah yang efektif harus memperhatikan efisiensi, transparansi, serta integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teknologi informasi, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang mendukung menjadi elemen penting untuk mengatasi berbagai kendala seperti ketidakjelasan status kepemilikan, birokrasi yang kompleks, dan spekulasi tanah. Dengan demikian, optimalisasi aset tanah tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi tanah itu sendiri tetapi juga menciptakan dampak multiplier yang positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam pengelolaan aset tanah. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan mekanisme pemanfaatan aset tanah yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal dan mendukung pembangunan ekonomi serta sosial yang inklusif.

References

- Affiff, S. A. (2019). *REDD, Land Management and Politics of Forest and Land Tenure Reform in Indonesia*.
- Agnes, A. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. [Institution not specified].
- AMRO. (2025). *Study on Financial Implications of Early Retirement of Coal-Fired Power Plants in Indonesia*.

- ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN+3 Regional Economic Outlook 2025*.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2020). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ghena, M. M., Carcaria, M. S. M., & Wellem, I. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 2393–2400. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42624>
- Ibrahim, F., & Ridwan, R. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- IMF. (2024). *Indonesia Financial Sector Assessment Program*.
- Istiharoh, H. (2023). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen*. [Institution not specified].
- Lindborg, J. D. (2023). *Lessons Learnt from Indonesia's National Strategic Projects on Infrastructure*. ERIA.
- Linuhung, Ts. (2023). *Asset Management, Optimization of Asset Use, and Its Contribution to Local Revenue*.
- Liu, C. (2022). Optimization of Spatial Pattern of Land Use: Ecological and Economic Perspectives. [Journal: PMC].
- McCarthy, J., & Robinson, K. (2017). *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS Publishing.
- Mi'raj, M. G. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Mubaraqh, M. (2025). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Myers, R. (2016). *Analyzing Multilevel Governance in Indonesia: Lessons for LAND-USE Change*. CIFOR.
- Nurdiana & et al. (2024). *Literature Review on Optimization of Local Asset Utilization in Indonesia*.
- Nustini, Y., & Nurrahman, M. H. (2023). Financial Performance Analysis of the Indonesian Property Industry. *UII Journal*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (2020).
- Peterson, G. E. (2008). *Unlocking Land Values to Finance Urban Infrastructure*. The World Bank.
- PwC Indonesia. (2023). *Indonesian Infrastructure: Stable Foundations for Growth – Land Acquisition and Asset Management*.
- Rahman, N. A. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju*. Universitas Hasanuddin.
- Reith, E. (2022). Exploring trade-offs in agro-ecological landscapes using multi-objective optimization. *Agriculture, Ecosystems & Environment*.
- Sinurat, D. (2020). *Penyalagunaan Penggunaan Aset Tetap Daerah dan Solusinya*.

- Tarigan, A. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- UN-Habitat. (2024). *Land Tenure Security in Asia-Pacific: Case Study Indonesia*.
- Urban Agenda Platform UK. (2023). *Integrating Data, Science and Innovation for Better Use of Land*.
- WRI Indonesia. (2020). *Looking Past the Horizon: Indonesia's Long-Term Climate Strategy and Land Use Management*.
- Yani, M. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Zhao, D. (2025). *Asset-Liability Management under Uncertain Economic Environments*. *Journal of Industrial and Management Optimization*.